



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT
PENSIUN PADA PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL (PERSERO) CABANG PEMBANTU SOLOK**

LAPORAN MAGANG



**SENDY FERNANDEZ
07054052**

**KEUANGAN PERBANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

No : 214/ SLK. SU. 1. 1/ VIII/ 2010

Solok, 30 Agustus 2010

Perihal : Keterangan Magang

Kepada Yth,

Koordinator Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Di Padang

Sehubungan dengan surat Bapak/ Ibu Koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas No : 675/ H.16.5/ PP-2010 tentang Pelaksanaan magang mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Sendy Fernandez
No. BP : 07 054 052
Jurusan : Keuangan Perbankan Program Diploma III
Fakultas : Ekonomi Universitas Andalas Padang

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan tugas dengan baik untuk magang di PT. Bank BTPN KCP. Solok selama 40 hari kerja (05 Juli 2010 s/d 27 Agustus 2010).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank BTPN KCP.Solok

Operational Supervisor


Yuza Ilzam

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Operational Supervisor PT. Bank BTPN KCP. Solok menerangkan bahwa :

Nama : Sendy Fernandez
No. BP : 07 054 052
Jurusan : Keuangan Perbankan Program Diploma III
Fakultas : Ekonomi Universitas Andalas Padang

Telah selesai melaksanakan magang dengan perincian nilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kehadiran	90	A
2	Kedisiplinan	92	A
3	Kerajinan	93	A
4	Kreatifitas	93	A
5	Kemampuan Adaptasi	91	A
6	Etika	93	A
	Nilai Rata - Rata	92	A

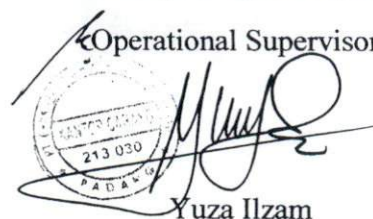
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan semestinya.

Catatan

Angka	huruf
81-100	A
66-80	B
56-65	C
50-55	D
>50	E

Solok, 30 Agustus 2010

Operational Supervisor


Yuza Ilzam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan magang ini dengan judul ***“Sistem Pemberian dan Pengawasan Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Cabang Pembantu Solok”***. Beriring shalawat dan salam untuk rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW panutan umat islam diseluruh dunia.

Penulisan Laporan magang ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan laporan magang ini yang terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan sekali kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan kedepan.

Rampungnya laporan magang ini tidak terlepas dari semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan yang tidak akan pernah penulis lupakan, oleh karena itu dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Papa dan Mama tercinta atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan do'a-do'a yang tulus tiada henti demi keberhasilan anakmu tercinta.

2. Yth Ibuk Dra. Meilini Malik, MM selaku Koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. Yth Ibu Raudhatul Hidayah, SE, ME, Akt. selaku ketua program studi Keuangan, sekaligus dosen penguji penulis dalam ujian komprehensif.
4. Yth Ibuk Rida Rahim, SE, ME selaku dosen pembimbing teori yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan bimbingan dan bantuan serta pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak, Armizal selaku Kepala Bank BTPN KCP. Solok, bapak Yuza Ilzam, pak Harei, Pak Aep, Pak Jim, Kak Osin, Kak Selvi, bang Men, Adi, Wili, Lunmay, Mas Moko, Bang Budi, dan seluruh staf BTPN yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan magang ini. Terima kasih untuk semuanya, selama magang di BTPN banyak pelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dan takkan terlupakan.
6. Ibuk Ketua dan Sekretaris Jurusan Keuangan Perbankan beserta Staff Biro Program Diploma III Fakultas Ekonomi Unand.

Persahabatan dilukiskan sebagai anugrah terindah yang diberikan oleh tuhan, menyayangi, kesetiaan, kepercayaan, pengorbanan dan saling memaafkan adalah kunci dari persahabatan sejati. Semua terasa begitu indah dimana ada canda, tawa, ceria dan kadang kala ada tangis yang dirasakan bersama dan selalu bersama. Persahabatan adalah kasih dan cinta, dia selalu setia ada disisimu dalam suka dan duka, dapat berbagi rasa dengan kehangatan dan berselimutkan kebahagiaan. Punya

tempat istimewa dihatimu dan selalu ada saat kau membutuhkannya, akan membantumu membangkitkan saat kau terjatuh. Sungguh bila kau dapat merasakannya dunia ini seakan tersenyum bahagia melihat persahabatan terjalin begitu indah. Terima kasih Allah atas anugerah-Mu, biarlah persahabatan ini terjalin abadi selamanya yang tak akan terkikis oleh waktu.

Special thank's ntuk sahabat dan motivator penulis :

1. My best friend di Keuangan Perbankan 07, yang sama sama berjuang dan menggila di universitas andalas, nama kalian penulis absen satu persatu, Ai sarimean, Andre botak, Dion benk, Fatur buncik, Genny lusuik, Harry jab, mbok-e Liza, Mul der, Nadia suna, Nia nur inyuk, Riska kawek, Rio doyok, Widya cupri pratiwi, dan terakhir tonggak tuo dan paliang disagani mak' yun. Baik dan buruknya kalian adalah harta paling berharga yang penulis miliki slama berjuang di Universita Andalas, kalian memberikan warna dalam hidup, kebahagiaan, canda tawa, kadang juga kesal. Semua kita lewati sampai detik ini dan semua tebingkai dengan indah dalam sebuah kenangan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga dimanapun dan bagaimanapun kita dimasa yang akan datang kebersamaan ini akan tetap indah untuk selamanya.
2. Buat warga kosan buk aji Nur tercinta, buk ajiiii I miss you, haha... pulang lah lai buk aji, caliak gae wak wisuda, uni suci tengkyu juga. Rizki alias panjul alias ii selamat merantau di negri orang, ang gunakanlah jurus jitu dari mulut dan aroma nafas ang ntuk mengaet wanita batak disutu yo. Buat edo kandak an lah siburak tu ka amak nyolai, buat veris capek ce babini yo bia ado yang mangamehan badan tu stek, trus buat ari, evan, budi, terimakasih kalian

semua yang telah memberikan dukungan untuk perjuangan penulis selama di Universitas Andalas.

3. Buat semua teman yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menuntut ilmu di universitas andalas, yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu persatu, teman teman KP 07, Chandra, winda, priska, riki jawa, dll dan semua teman yang telah memberikan warna dalam perjalanan penulis selama di Universitas Andalas, Nina, Inez, Demi, Yani, irwan, O-om, dll, terimakasih untuk semuanya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca terutama penulis sendiri.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan.....	4
1.4 Tempat dan Waktu Magang.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kredit.....	8
2.1.1 Pengertian Kredit.....	8
2.1.2 Fungsi Kredit.....	9
2.1.3 Unsur-unsur kredit.....	10
2.1.4 Jenis-jenis Kredit.....	11
2.1.5 Analisa Kredit.....	13
2.2 Pemberian Kredit.....	17
2.2.1 Tujuan Pemberian Kredit.....	17
2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit.....	18
2.3 Pengawasan Kredit.....	20
2.3.1 Pengertian Pengawasan kredit.....	20
2.3.2 Tujuan pengawasan kredit.....	21

2.3.3	Pelaksanaan pengawasan kredit.....	21
2.3.4	Unsur pengawasan.....	23
2.4	Gambaran Umum Kredit Pensiun.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO)

3.1	Sejarah singkat PT. BTPN.....	27
3.2	Visi dan Misi PT. BTPN.....	29
3.3	Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan.....	29
3.4	Struktur Organisasi PT. BTPN.....	31
3.5	Perkembangan PT. BTPN.....	37

BAB IV SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO) CABANG PEMBANTU SOLOK

4.1	Prosedur Pemberian/ pelaksanaan Kredit Pensiun	39
4.2	Perkembangan kredit Bank BTPN KCP. Solok	45
4.3	Pengawasan Kredit Pensiun.....	46
4.4	Pengelolaan kredit bermasalah.....	49
4.5	Kebijaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah	51

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan kredit Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok periode 2007-2009.....	45
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian suatu Negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana perbankan memegang peranan yang sangat penting dan dapat dikatakan sebagai urat nadi dari sistem perekonomian. Pada hakikatnya bank dalam pengertian secara umum merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, selain itu bank juga menjalankan usaha lain yang biasa dilakukan didunia perbankan. Dengan penyaluran kredit bank memperoleh imbalan berupa bunga. Bunga merupakan salah satu elemen laba bagi bank. Karena itu untuk meningkatkan labanya, bank harus lebih giat dalam penyaluran kredit, dan untuk memenuhi kebutuhan dana penyaluran kredit bank juga harus giat dalam usaha penghimpunan dana dari masyarakat.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank memberikan bunga simpanan kepada penyimpan, dan dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar bunga simpanan maka semakin besar pula bunga kredit dan demikian pula sebaliknya. Selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dana dengan bunga kredit yang disalurkan merupakan keuntungan utama bagi bank. Keuntungan dari selisih bunga ini

dalam perbankan dikenal dengan istilah *spread based*, sedangkan kerugian dari selisih bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit dikenal dengan istilah *negative spread*.

Dasar dari kredit adalah unsur kepercayaan, yang berarti pemberi kredit (kreditur) percaya kepada si penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan kembali sesuai perjanjian. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dari kegiatan kredit saat ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja, antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Sebagai tindakan antisipatif terhadap resiko yang ditimbulkan kegiatan perkreditan, maka bank harus menetapkan prosedur dan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah agar tidak terjadi masalah yang dapat merugikan antara bank dengan nasabah. Selanjutnya bank harus melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan. Kegiatan pengawasan kredit merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau di investasikan dibidang perkreditan. Pengawasan kredit dalam arti luas akan meliputi pengawasan sebelum kredit diberikan (*steering control*), pengawasan pada waktu proses

persetujuan kredit (*post action control*) dan pengawasan setelah kredit diberikan (*feedback control*).

Bank tabungan Pensiunan Nasional merupakan Bank swasta Nasional yang memiliki modal yang kuat dan suku bunga yang relative rendah, Bank BTPN bergerak untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pensiunan, oleh karena itu disini penulis mencoba untuk membahas lebih dalam mengenai salah satu produk kredit yang diberikan oleh Bank BTPN kepada para pensiunan yaitu Kredit Pensiun. Kredit pensiun bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat khususnya para pensiunan.

Dalam pemberian kredit pensiun tentunya perlu dilakukan pengawasan mulai dari permohonan kredit oleh calon debitur, sampai kredit tersebut dilunasi kembali oleh debitur agar Bank mampu memperoleh keuntungan dari penyaluran kredit. Dengan memperhatikan pentingnya pengawasan dalam penyaluran kredit pensiun, sehingga disini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai kredit pensiun dengan judul “SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO) CABANG PEMBANTU SOLOK”.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional
2. Bagaimana Bank Tabungan Pensiunan Nasional melakukan pengawasan terhadap kredit yang telah disalurkan kepada nasabah.
3. Bagaimana pengelolaan kredit bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
4. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengembalian kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mendapatkan kredit.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional dalam mengawasi kredit yang telah disalurkan.
4. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan bagaimana usaha yang dilakukan bank dalam mengatasi masalah kredit.

5. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Dari hasil pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak, yaitu :

a. Bagi penulis

1. Bagi penulis sendiri kegiatan magang ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dan membandingkan teori yang dipelajari dengan penerapan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
2. Untuk mengetahui dan mengenal dunia kerja secara nyata.

b. Bagi universitas

1. Dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja saat ini.
2. Meningkatkan hubungan antara Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja dengan lembaga yang menggunakan tenaga kerja.

c. Bagi Bank Tabungan Pensiunan Nasional

1. Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
2. Menjalin kerja sama yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Sesuai dengan kebijaksanaan fakultas yang memberikan kriteria tempat magang bagi mahasiswa yaitu pada instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu penulis perlu mencari tempat magang sesuai dengan kebijaksanaan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan mengingat jurusan yang penulis ambil di Universitas yaitu keuangan Perbankan, maka penulis memilih Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai tempat Magang Penulis, yang mana penulis sangat mengharapkan agar dapat menerapkan ilmu yang diterima di Universitas dengan praktek sebenarnya di dunia kerja. Untuk jadwal pelaksanaan magang, penulis memulai pelaksanaan magang ini dimulai dari tanggal 5 Juli 2010 sampai 27 Agustus 2010.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sistematika penulisan atau pembuatan laporan magang ini masalah yang akan dibahas sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang penulis ajukan. Sistematika penulisan laporan dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pelaksanaan magang, manfaat pelaksanaan magang, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian kredit, jenis jenis kredit, analisa

kredit, pengertian pengawasan kredit, dan pelaksanaan pengawasan kredit.

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL

Merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah pendirian dan perkembangan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, visi dan misi, ruang lingkup kegiatan, dan struktur organisasi Bank Tabungan Pensiunan Negara.

BAB IV SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO) CABANG PEMBANTU. SOLOK

Merupakan bab yang menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian kredit, pengembalian kredit, dan pengawasan kredit yang telah disalurkan, serta menjelaskan tatacara pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan pada rangkian laporan magang yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran yang hendak disampaikan yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah percaya. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. (Thomas Suyatno, 2003).

Menurut Undang Undang Perbankan nomor 10 tahun 1988, menyatakan :

Credit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai imbalan bunga/ bagi hasil dan atau imbalan lainnya.

Dari pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi debitur

(penerima kredit) merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

1. Untuk meningkatkan daya guna dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, tapi dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna dengan dikelola oleh sipenerima kredit sehingga menghasilkan barang atau jasa.

2. Untuk meningkatkan daya guna dan lalu lintas barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barangnya yang tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat, mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bernilai ekonomi.

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan pemberian kredit akan meningkatkan kegiatan jual beli barang dan jasa dalam masyarakat yang berakibat terciptanya ekonomi yang stabil.

4. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi sipenerima kredit tentu akan meningkatkan semangat untuk berusaha, menambah modal untuk usaha yang telah berjalan ataupun untuk mendirikan usaha baru.

5. Meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan silaturahmi antar kedua Negara, saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan sipemberi kredit, dan bahkan kerja sama akan berlanjut dalam bidang lainnya.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan pemberian kredit maka masyarakat tentunya akan menjalankan usaha dengan pinjaman yang diperolehnya, dengan menjalankan usaha maka pendapatan masyarakatpun akan meningkat.

7. Mengubah cara berfikir masyarakat untuk hidup lebih ekonomis.

Sebagai masyarakat yang meminjam kredit tentunya memiliki kewajiban untuk melunasi kredit, sehingga menuntut si peminjam untuk hidup lebih hemat.

2.1.3 Unsur-unsur kredit

Adapun unsur unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sbb:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. Kesepakatan

Suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditur ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing masing.

c. Jangka waktu

Suatu masa pengembalian kredit yang telah disepakati, biasanya berbentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya penyaluran kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar pula resikonya, begitu juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja (misalnya bencana alam).

e. Balas jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi bank.

2.1.4 Jenis-jenis kredit

1) Dilihat dari segi kegunaan dibagi atas, (Kasmir, 2003):

a. Kredit Investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat dari tujuan kredit dibagi atas:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi dalam menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dilihat dari segi jangka waktu terdiri atas :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembalaianya diatas 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Dilihat dari segi jaminan terdiri dari:

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan, biasanya kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

5) Dilihat dari segi sektor usaha terdiri dari :

- a. Kredit Pertanian
- b. Kredit Peternakan
- c. Kredit Industri
- d. Kredit Pertambangan
- e. Sektor-sektor lainnya

2.1.5 Analisa kredit

Analisis atau penilaian kredit adalah proses menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sehingga dapat memberikan keyakinan terhadap pihak bank bahwa calon debitur pantas untuk mendapatkan kredit. Cara yang sampai saat ini masih digunakan untuk menganalisa apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan layak bekerjasama dengan bank adalah meliputi :

a. Analisa 5 C

1. *Character (watak)*

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur, dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk mengembalikan pinjamannya.

2. *Capacity (kemampuan)*

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam mengelola keuangan yang dimilikinya, sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

3. *Capital (modal)*

Yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan calon debitur yang bersangkutan.

4. *Collateral (jaminan)*

dalam hal ini jaminan sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai tersebut gagal atau debitur tidak mampu melunasi kreditnya.

5. *Condition of economy (kondisi ekonomi)*

Bank harus menganalisa keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil usaha debitur dapat diketahui.

b. Analisa 7 P

1. *Personality*

menilai nasabah dari tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu. Personality ini mencakup sikap, emosi, dan tingkah laku nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah berdasarkan moral, loyalitas dan karakter, dimana setiap klasifikasi nasabah mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, apakah kredit tersebut akan digunakan untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan income perusahaan.

4. *Prospect*

Jika prospek perusahaan dimasa akan datang terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika buruk maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan calon debitur agar pengendalian kredit dapat berjalan lancar.

5. *Payment*

Bank harus memperhatikan apakah sumber pembiayaan kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman sehingga debitur dapat melunasi kredit sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

6. *Profitability*

Menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit kembali.

7. *Protection*

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Perlindungan tersebut berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

c. **Analisa 3 R**

1. *Return*

Adalah hasil yang diperoleh oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan. Apakah hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman sekaligus membantu perkembangan kualitas perekonomian calon debitur bersangkutan maka kredit dapat diberikan dan sebaliknya.

2. *Repayment*

Adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur.

3. *Risk Bearing Ability*

Adalah memperhitungkan besarnya kemampuan calon debitur untuk menghadapi resiko yang ditentukan oleh besarnya modal, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan yang bersangkutan.

2.2 Pemberian Kredit

2.2.1 Tujuan Pemberian Kredit

Adapun tujuan pemberian kredit bagi bank adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit,

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administratif kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana yang ada.

Dana masyarakat yang tersimpan di bank dimanfaatkan oleh bank untuk dipinjamkan kepada masyarakat untuk meraih keuntungan, semakin banyak dana yang tersalurkan maka semakin besar pula keuntungan yang diterima.

3. Memenuhi permintaan kredit dari nasabah.

Permintaan kredit cukup tinggi dari para nasabah, apalagi pada era globalisasi saat ini. Tingginya permintaan kredit sangat berpengaruh positif bagi pertumbuhan Bank, saat ini masyarakat banyak yang mengajukan kredit baik untuk usaha maupun konsumsi mereka, dan hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Bank untuk meraih keuntungan yang maksimal.

4. Melaksanakan kegiatan operasional

Kegiatan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

5. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum (Kasmir, 2002) sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas Berkas, meliputi:

- a. Jenis kredit yang diinginkan
- b. Maksud dan tujuan penggunaan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu yang diinginkan calon debitur
- d. Cara pengembalian kembali kredit
- e. Jaminan kredit, untuk menutupi resiko kredit macet

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Dilakukan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan. Jika menurut pihak Bank belum lengkap maka diminta kepada nasabah untuk melengkapi sesuai syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank.

3. Wawancara I

Langkah ini dilakukan agar pihak bank berhadapan langsung dengan calon debitur, sehingga pihak bank dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya.

4. On the spot

Dalam tahap ini pihak Bank langsung terjun kelapangan dengan meninjau bagaimana keadaan ekonomi dan jaminan nasabah sebenarnya. Kemudian hasil on the spot akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan tahap perbaikan berkas jika ada yang masih kurang pada saat dilakukan on the spot.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dilaksanakan secara tertulis sebagai bukti dokumentasi yang ditanda tangani oleh pejabat kredit. Keputusan kredit dapat berupa disetujui, ditolak atau ditangguhkan. Permohonan kredit yang ditangguhkan atau ditolak harus diberitahukan kepada calon debitur dengan alasan penolakan atau penangguhannya. Bagi kredit yang disetujui diberitahukan sesuai syarat dan ketentuan yang diputuskan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit.

7. Penandatanganan akad kredit

Sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu debitur menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian lainnya yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- Antara bank dengan debitur secara langsung
- Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Apabila semua persyaratan telah layak dan akad kredit telah dilaksanakan maka berulah kredit dapat direalisasikan. Realisasi kredit biasanya ditandai dengan pembukaan rekening tabungan debitur pada bank untuk pencairan kredit nantinya.

9. Pencairan kredit

Kredit dicairkan ke rekening debitur yang ada pada Bank. Dan selanjutnya untuk penarikan dana kredit tersebut dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap oleh debitur.

2.3 Pengawasan Kredit

2.3.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (*Teguh Pudjo Mulyo*).

Pengawasan kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan dari pemberian kredit selain ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Secara umum, pengawasan merupakan pengendalian kredit dalam manajemen

control yang meliputi audit financial, audit operasional dan audit manajemen.

2.3.2 Tujuan Pengawasan Kredit

Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang perkreditan, untuk menghindari penyelewengan, baik dari dalam maupun luar bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk meningkatkan efisiensi didalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan.
- d. Untuk menciptakan tatacara perkreditan yang sesuai aturan demi tercapainya tujuan yang baik untuk nasabah dan bank.

2.3.3 Pelaksanaan pengawasan kredit

1. Pengawasan ganda

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit yang dapat menimbulkan kerugian financial bagi bank.

2. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan, agar tugas bawahan berjalan secara efektif sesuai dengan rencana, kegiatan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit dari bank.

4. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional perkreditan bank dilakukan oleh auditor internal bank, organisasi yang dibentuk dengan fungsi sebagai pengawas intern, terhadap satu unit kerja kantor cabang yang dapat dilakukan setiap periode tertentu.

5. Pengawasan eksternal

Pengawas eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau instansi diluar lingkungan bank, dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dewan Perwakilan Rakyat, Masyarakat dan sebagainya.

2.3.4 Unsur pengawasan

Suatu sistem pengawasan yang baik harus mengikuti unsur-unsur pengawasan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi

Dalam menyusun struktur organisasi yang perlu diperhatikan adalah organisasi yang dibentuk harus dapat menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk memenuhi syarat tersebut hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasionalnya, penyimpanan dan pencatatan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan

Manajemen harus menetapkan pembagian kerja yang tepat, dan mengawasi setiap kegiatan dan transaksi yang terjadi, dan mengklasifikasikan setiap data transaksi dan akuntansi untuk menciptakan pembukuan yang sehat.

3. Pelaksanaan yang sehat

Setiap pegawai melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila setiap pegawai melakukan tugasnya dengan tepat, maka dapat diharapkan tercipta pengawasan yang baik.

4. Pegawai yang cakap

Dalam penerimaan pegawai baru bank harus melakukan seleksi yang jujur dan selektif. Pegawai yang cakap dalam suatu pekerjaan bukan berarti tingkat pendidikannya yang tinggi, tetapi mungkin dengan pendidikan yang menengah tapi mempunyai semangat kerja yang

tinggi akan mampu bekerja baik untuk perusahaan. Hal ini perlu diperhatikan dalam mendapatkan pegawai yang cakap tapi ekonomis.

Sarana pengawasan dalam perkreditan adalah sama dengan sarana administrasi perkreditan, namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Sarana pengawasan yang mempunyai tingkatan tertinggi adalah perundang undangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang mengatur perkreditan.

Secara lebih terperinci sarana pengawasan tersebut meliputi :

1. Sarana yang berwujud, meliputi :
 - a. Berbagai bentuk formulir isian yang dipakai oleh bank dibidang perkreditan beserta alat tulis kantor.
 - b. Buku pedoman penyaluran kredit.
 - c. Alat-alat kantor seperti peralatan untuk mendeteksi dokumen palsu.
 - d. Mesin mesin untuk mencatat transaksi seperti computer.
 - e. Kabin penyimpanan yang memadai untuk perlindungan terhadap dokumen dokumen.
 - f. Alat komunikasi, seperti telepon, jaringan internet, dan alat transportasi untuk pelaksanaan inspeksi on the spot ke proyek nasabah yang tersebar di berbagai lokasi.
 - g. Anggaran, adalah sarana yang sangat penting dalam pengawasan kredit, dengan anggaran yang memadai maka akan mendukung terlaksananya pengawasan kredit dengan baik.

2. Tenaga kerja

Manusia sebagai pelaksana agar sarana tersebut dapat berfungsi maka harus ada tenaga operator yang melaksanakannya. Setiap tenaga kerja memerlukan pola pengawasan yang berbeda satu sama lainnya sesuai situasi dan kondisi dari debitur itu sendiri. Karena itulah aparat perkreditan yang ada harus dibekali berbagai macam keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

2.4 Gambaran Umum Kredit Pensiunan

Kredit pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada para pensiunan yang dikelola oleh lembaga pengelola pensiun yang melakukan kerja sama dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional dalam hal pembayaran pensiunan dan/atau pemotongan hak pensiun baik melalui lembaga pengelola pensiun terkait maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga pengelola pensiun.

Kredit pensiunan adalah salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional bagi para pensiunan guna meningkatkan semangat para pensiunan untuk terus berusaha dengan membuka lapangan kerja sendiri untuk meningkatkan taraf hidup para pensiunan dan ikut menjaga perekonomian nasional.

Jenis kredit pensiunan :

1. Kredit jenis KPN

Yaitu kredit pensiun bagi para pensiunan yang menerima pembayaran gaji pensiun melalui loket bank, menggunakan tabungan pension yang dikelola oleh bank untuk menampung pembayaran gaji pension.

2. Kredit jenis KPP

Yaitu kredit pension bagi pensiunan yang pembayaran gajinya dilakukan melalui instansi lain yang mempunyai kerja sama dengan bank dalam hal pemotongan gaji pensiun untuk pelunasan angsuran.

3. Kredit jenis KPT

Yaitu kredit yang diberikan kepada “calon pensiunan” dalam rangka penerimaan tunjangan hari tua.

4. Kredit Joint Finance

yaitu kredit pensiunan dengan pola pembiayaan bersama antara bank BTPN dengan mitra joint finance sesuai dengan porsi yang telah diepakati dalam perjanjian kerja sama.

BAB III

GAMBARAN UMUM

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO)

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Bank BTPN didirikan di Bandung pada 5 februari 1958, pada awalnya bernama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai badan perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi para pensiun, baik militer maupun sipil. Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggotanya perkumpulan BAPEMIL membentuk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Pada tahun 1992 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua, yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.005/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia

sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan.

Untuk memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT. Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan "Tri Program Taspen," yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang Pensiunan.

Selain terus mengembangkan bisnis inti di pangsa pasar pensiun yang telah menjadi tulang punggung selama 50 tahun, pada akhir 2008 BTPN telah mengembangkan usahanya di pangsa pasar Usaha Mikro Kecil dan Unit Usaha Syariah, dengan membuka 46 cabang btpn mitra usaha rakyat di seluruh Indonesia dan 2 Cabang Syariah di Bandung dan Jakarta. Kini, BTPN dikenal sebagai bank publik skala menengah bereputasi prima dan salah satu bank dengan kinerja keuangan terbaik di

Indonesia, yang telah meraih berbagai pengakuan dalam bentuk penghargaan dari lembaga-lembaga terkemuka dan terpercaya.

3.2 Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Visi

“ Menjadi penyedia jasa keuangan ritel yang terpilih dan penuh kepedulian di Indonesia”

Misi

Melaksanakan good corporate governance (GCG) disetiap pengoperasian bisnis bank BTPN

- Menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan bisnis bank BTPN kepada nasabah
- Memberikan pengalaman brand yang penuh arti bagi pemangku kepentingan (stakeholders) Bank BTPN disetiap saat dimanapun kami berada secara konsisten
- Menjamin keamanan, kepercayaan, dan kemudahan akses bagi nasabah Bank BTPN melalui penggunaan teknologi mutakhir disetiap pengoperasian bisnis kami.

3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Tujuan pendirian BTPN adalah untuk membantu program pemerintah dalam kegiatan public service dan sesuai misi pelayanan kepada para pensiunan, dimana tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek tetapi juga disertai kepedulian untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelayanan secara menyeluruh. Disamping itu tujuan lain BTPN adalah

untuk menjadikan bank BTPN sebagai Bank yang besar, sehat dan sejahtera melalui peningkatan dan perbaikan pelayanan kepada pensiunan sesuai dengan misi dan visi Bank BTPN.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka ruang lingkup kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank BTPN adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Jenis tabungan dan deposito yang ditawarkan Bank BTPN antara lain :

Tabungan :

- Tabungan Citra
- Tabungan Citra Puls
- Tabungan Dana Pensiun

Deposito :

- Deposito berjangka
- Deposito On Call
- Sertifikat Deposito

2. Memberikan berbagai fasilitas kredit kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkan. Jenis fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank BTPN antara lain :

- Kredit pensiun
- Kredit pegawai aktif
- Kredit karyawan
- Kredit deposan Bank BTPN
- Kredit untuk kegiatan usaha kecil

- Kredit modal kerja dan investasi
3. Melakukan pemberian jasa bank lainnya seperti, pembayaran uang pensiun, transfer, pembayaran telepon dan listrik, dan lainnya.
 4. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan kantor cabang.

3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Ditinjau dari organisasinya, bank BTPN memakai *branch banking system* (sistem perbankan bercabang) yaitu suatu sistem perbankan yang memiliki satu atau lebih Kantor Cabang. Bank BTPN cabang Solok merupakan salah satu cabang PT. BTPN untuk wilayah Sumatra Barat yang memiliki 2 Kantor kas.

Secara umum organisasi dapat diartikan sebagai wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi organisasi yang ada diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa organisasi itu sangat perlu sekali untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Dengan adanya organisasi memungkinkan kita melakukan apa saja. Dalam suatu organisasi kita akan menemukan istilah struktur baik bersekala kecil maupun bersekala besar. Jadi struktur organisasi itu dapat memberi gambaran tentang serangkaian kegiatan yang tujuannya agar setiap kelompok yang berada didalamnya dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi dapat dibedakan atas kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Organisasi Garis (*Line Organization*)

Bentuk organisasi garis, kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkatan pimpinan dari atas ke bawah. Setiap atasan mempunyai bawahan yang bertanggung jawab pada atasannya.

2. Organisasi Fungsional (*Funcional Organization*)

Bentuk organisasi ini tidak mempunyai sejumlah bawahan yang jelas, setiap atasan berwenang memberi perintah kepada setiap bawahannya.

3. Organisasi Baris dan Staf (*Line and Staff Organisation*)

Bentuk organisasi ini banyak dianut perusahaan besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit dengan jumlah karyawannya yang banyak. Terdapat satu atau lebih tenaga staf, staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasehat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pemimpin.

4. Organisasi Staf dan Fungsional (*Functional and staf Organization*)

Bentuk oaganisasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis serta bentuk staf.

Dalam melakukan aktivitas, manajemen Bank BTPN dikelola oleh suatu tatanan manajemen sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Secara garis besar tugas pokok dari komisaris adalah memperhatikan, mengontrol dan mengevaluasi kinerja dari direksi-direksi dan disamping itu mengambil keputusan-keputusan yang sangat prinsipil dalam manajemen

b. Dewan Direksi

Terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Marketing Dana, Direktur Marketing Kredit dan Direktur Perencanaan dan pembangunan yang dibantu oleh divisi-divisi mempunyai tugas untuk menjalankan roda organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang dibuat dan melakukan kontrol terhadap kinerja kantor cabang.

c. Kantor Cabang

Kegiatan operasional Bank BTPN dilaksanakan di Kantor Pusat Operasional dan 29 Kantor Cabang beserta seluruh kantor cabang pembantu, kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia

Dari struktur organisasi itu dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN merupakan organisasi yang menggunakan struktur organisasi struktural.

Adapun pembagian tugas dan fungsi tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang bertanggung jawab langsung kepada Direksi, sehingga dapat dikatakan wakil direksi di daerah (cabang). Tugas yang dijalankan adalah memegang semua kegiatan pada kantor cabang yang dipimpinnya sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen dilingkungan kerjanya, meningkatkan efisiensi, profesionalitas, meningkatkan volume dan pendapatan bank serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh kantor cabang melalui rencana kerja dan anggaran.

2. Kepala Bidang Pemasaran

Kepala bidang pemasaran bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang untuk setiap kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil, dimana mempunyai tugas memasarkan produk-produk yang ada pada kantor cabangnya juga dalam hal ini membawahi secara langsung terhadap marketing kredit dan funding serta pelayanan

3. Kepala Bidang Operasi

Kepala bidang operasi juga bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan cabang untuk setiap keputusan yang diambil dan untuk setiap kerja yang dilakukan. Kepala bidang operasi

mempunyai tugas dalam pembinaan SDM serta kinerja operasional sehari-hari yang ada di kantor cabang.

4. Urusan Dana dan Jasa

Mempunyai tugas yang berhubungan dengan masalah keluar masuknya dana dan bertanggung jawab terhadap masalah penempatan dana pihak ke III. Bagian ini membawahi tiga sub divisi, tabungan, deposito, dan kliring. Setiap divisi memiliki tugas masing-masing. Bagian tabungan tugasnya menangani tabungan citra dan citra pensiun, bagian deposito untuk masalah deposito dan bagian kliring untuk urusan transfer. Seksi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi

5. Urusan Kas/ Teller

Mempunyai tugas yang berhubungan dengan keluar masuknya dana sehari-hari, baik dari dana pihak ke III atau dana yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan, seksi ini bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran.

6. Urusan Pelayanan

Tugasnya melayani nasabah yang akan melakukan transaksi seperti tabungan citra pensiun, tabungan umum citra dan deposito (CSO). Selain itu ada yang bertugas mencari dana segar yang disebut dengan FO (funding officer) tugasnya mencari nasabah. Urusan ini bertanggung jawab kepada kepala bidang operasional.

7. Urusan Kredit

Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran, mempunyai tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perkreditan. Dari mulai penyaluran kredit hingga pertanggungjawaban masalah kredit dan penyelesaiannya. Mengatur juga tentang pengolahan administrasi kredit sehingga dapat menghasilkan forto folio yang berkualitas tinggi.

8. Urusan EDP

Mempunyai tugas dan masalah proses terhadap data-data yang ada dalam komputer, termasuk juga menciptakan program guna membantu operasional dan masalah komputer serta mengamankan seluruh instalasi komputer yang ada, baik hardware maupun software.

9. Urusan Umum/ Personalia

Mempunyai tugas yang berhubungan dengan masalah umum perusahaan, termasuk masalah sumber daya manusia serta inventaris yang ada pada kantor cabang Satpam, OB, outsourcing dan driver berada dibawah divisi ini. Urusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.

10. Urusan Akuntansi

Mempunyai tugas yang berhubungan dengan masalah pembukaan keuangan perusahaan termasuk pelaporan-pelaporan mengenai

keuangan perusahaan kepada instalansi terkait. Seksi ini bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.

3.5 Perkembangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

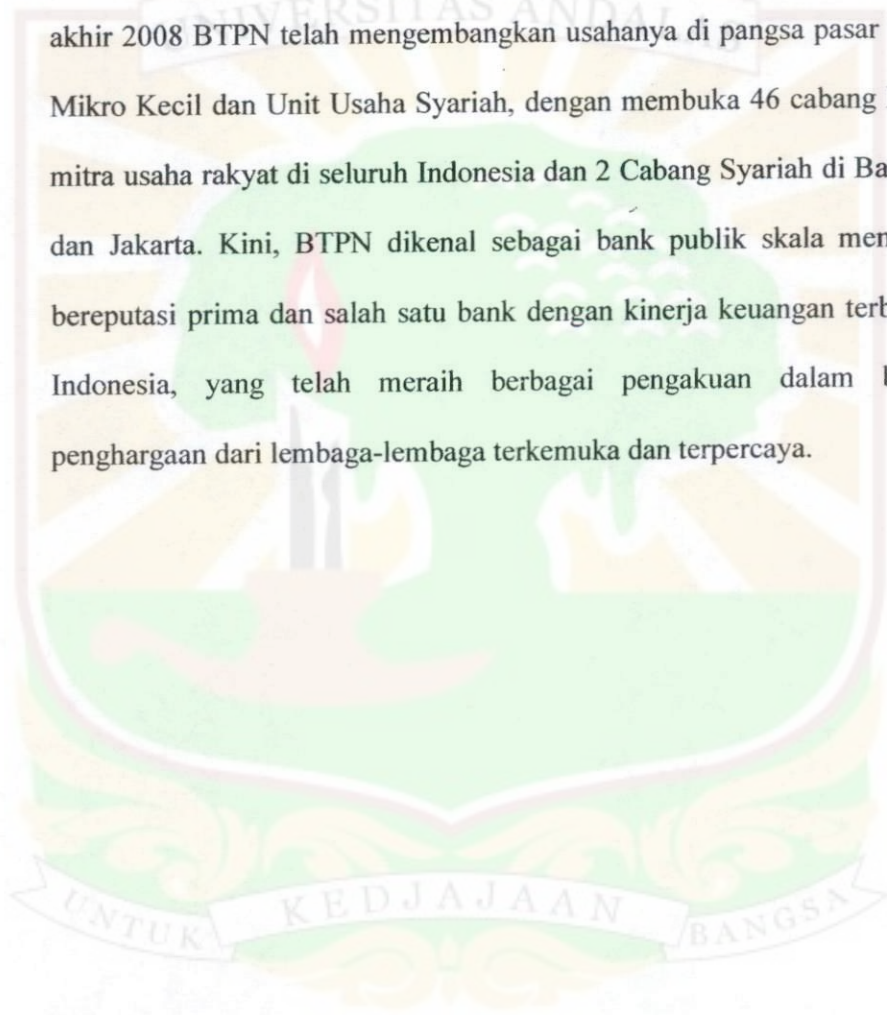
Berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO-88 serta apa yang dituntut paket kebijaksanaan pemerintah 11 Januari 1989 (PAKJAN), Bank BTPN telah berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada sejalan dengan rencana perkembangannya baik vertikal maupun horizontal.

Sebagai salah satu manifestasi BTPN dalam memanfaatkan peluang yang terbuka, dalam tahun 1989 telah dilakukan perluasan wilayah operasionalnya ke wilayah-wilayah diluar pulau Jawa dengan memindahkan ijin beberapa kantor cabang kewilayah yang lebih potensial dipulau Jawa. Dengan pemindahan ini diharapkan pula jasa perbankan BTPN dapat dinikmati secara lebih merata diseluruh Indonesia, khususnya masyarakat pensiun. Dalam perkembangan usahanya Bank BTPN merupakan satu-satunya bank yang tetap committed terhadap masyarakat pensiun.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan operasionalnya, Bank BTPN telah menjalani kerjasama dengan PT. TASPEN (Persero), PT. Posindo (Persero) Bank BPD, PWRI, PEBABRI, Perum ASABRI dan instansi lain yang terkait.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan dan pembayaran pensiun melalui rekening khususnya dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat luar pada umumnya.

Pada saat ini selain terus mengembangkan bisnis inti di pangsa pasar pensiun yang telah menjadi tulang punggung selama 50 tahun, pada akhir 2008 BTPN telah mengembangkan usahanya di pangsa pasar Usaha Mikro Kecil dan Unit Usaha Syariah, dengan membuka 46 cabang BTPN mitra usaha rakyat di seluruh Indonesia dan 2 Cabang Syariah di Bandung dan Jakarta. Kini, BTPN dikenal sebagai bank publik skala menengah bereputasi prima dan salah satu bank dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia, yang telah meraih berbagai pengakuan dalam bentuk penghargaan dari lembaga-lembaga terkemuka dan terpercaya.



BAB IV
SISTEM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PENSIUN
PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (PERSERO)
CABANG PEMBANTU SOLOK

4.1 Prosedur Pemberian/ pelaksanaan Kredit Pensiun

Prosedur pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting, karena prosedur merupakan seleksi dalam pemberian kredit. Kesalahan pemberian kredit pada nasabah dapat menimbulkan kredit bermasalah.

Prosedur dalam pemberian kredit meliputi :

1. Permohonan kredit

Calon Debitur harus mengajukan permohonan kredit (mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan kredit pensiun), dan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan permohonan kredit pensiun, dokumen tersebut meliputi :

- Aplikasi permohonan kredit pensiun
- Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diterbitkan instansi berwenang, yang nantinya SKEP asli ini akan disimpan oleh BTPN sebagai jaminan dan bukti bahwa debitur melakukan pinjaman pada BTPN.
- Asli dan fotokopi kartu identitas pensiun
- Asli dan fotokopi Kartu tanda penduduk
- Asli dan fotokopi kartu keluarga

- Bukti pembayaran uang pensiun terakhir oleh BTPN atau instansi lain yang juga membayar uang pensiun.

2. Identifikasi Permohonan

Permohonan kredit diidentifikasi melalui pemeriksaan keabsahan permohonan dan kelengkapannya. Apakah syarat yang diberikan sudah memadai sesuai dengan jenis kredit yang dimohonkan. Identifikasi permohonan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk analisa kredit dengan cara antara lain :

- Wawancara, merupakan penyidikan langsung kepada calon debitur, untuk meyakinkan apakah data-data yang diberikan adalah benar, dan lengkap seperti yang diinginkan bank, dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya, dan untuk mengetahui tujuan penggunaan kredit oleh debitur.
- Kunjungan kelokasi untuk mengecek kebenaran data-data yang dilaporkan oleh calon debitur.

3. Tahap Negosiasi

Pada tahap ini dilakukan negosiasi antara bank dengan nasabah, negosiasi ditujukan agar nasabah mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhinya sebagai seorang debitur, hak-hak yang akan diterima, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang calon debitur.

4. Persetujuan kredit

Persetujuan kredit dilaksanakan secara tertulis sebagai bukti dokumentasi yang ditanda tangani oleh pejabat kredit sesuai kewenangan pemberian kredit. Persetujuan kredit dapat berupa disetujui, ditolak atau ditangguhkan. Permohonan kredit yang ditangguhkan atau ditolak harus diberitahukan kepada calon debitur dengan alasan penolakan atau penangguhannya. Bagi kredit yang disetujui diberitahukan sesuai syarat dan ketentuan yang diputuskan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit (SPK).

5. Perjanjian Kredit

a) Penandatanganan perjanjian kredit

Penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan setelah adanya persetujuan kredit dan dipenuhinya persyaratan kredit, penandatanganan kredit dilakukan pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) oleh calon Debitur dan pejabat kredit yang berwenang. Surat Perjanjian Kredit dibuat minimal rangkap 3 :

- Asli bermaterai untuk Bank
- Tindakan pertama untuk debitur
- Tindakan kedua untuk arsip

b) Dokumen kredit pensiun yang wajib ada dan harus dilengkapi oleh nasabah dan pihak Bank, meliputi :

1) Dokumen nasabah (wajib ada)

- Aplikasi permohonan kredit pensiun

- Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diterbitkan instansi berwenang, yang nantinya SKEP asli ini akan disimpan oleh BTPN sebagai jaminan dan bukti bahwa debitur melakukan pinjaman pada BTPN.
- Asli dan fotokopi kartu identitas pensiun
- Asli dan fotokopi Kartu tanda penduduk
- Asli dan fotokopi kartu keluarga
- Bukti pembayaran uang pensiun terakhir oleh BTPN atau instansi lain yang juga membayar uang pensiun.

2) Dokumen hukum (wajib ada)

- Surat Perjanjian Kredit (SPK), ditanda tangani oleh debitur dan pejabat bank yang berwenang
- Surat kuasa debit rekening (jika pengambilan gaji pensiun di loket BTPN), atau surat kuasa pemotongan gaji pensiun (jika pengambilan gaji pensiun pada instansi lain)
- Tanda terima dokumen
- Bukti pembayaran premi asuransi
- Rincian pinjaman
- Rincian jadwal angsuran
- Surat persetujuan suami istri

3) Dokumen kredit lainnya

Adalah dokumen yang harus dilengkapi dalam proses kredit, sesuai kondisi yang dipersyaratkan, antara lain :

- Formulir wawancara
- Memorandum persetujuan kredit
- Memorandum persetujuan deviasi apabila terdapat kredit dengan deviasi diluar kriteria yang telah ditentukan.
- Laporan hasil bank survey/ *BI checking* yang memuat hasil checking, apabila terdapat keraguan-keraguan dalam pemberian kredit.

6. Pencairan kredit

Pencairan kredit pensiun hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi seluruh kriteria dan syarat yang ditentukan. Pencairan kredit akan di kreditkan ke rekening tabungan citra pensiun atas nama debitur sebesar total kredit yang telah disetujui (bagi pensiunan yang uang pensiunnya dibayarkan di BTPN), atau dibayarkan secara tunai kepada debitur (apabila uang pensiun dibayarkan diloket bayar dana pensiun lainnya seperti kantor POS). Jumlah yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan atas biaya-biaya kredit meliputi biaya administrasi, premi asuransi, dan biaya materai/ sesuai ketentuan.

7. Pembayaran kembali kredit

Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung uang pensiun baik melalui lembaga pengelola pensiun

terkait yakni BTPN, maupun oleh pihak ke 3 yang ditunjuk oleh lembaga pengelola pensiun. Pemotongan langsung ini dapat dilakukan oleh BTPN karena telah melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola pensiun dalam hal pembayaran pensiun atau pemotongan hak pensiun.

8. Pelunasan kredit

- Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo (dipercepat) dapat dilakukan oleh debitur. Penyelesaian dan pelunasan atas fasilitas kredit apabila telah dipenuhinya semua kewajiban utang debitur terhadap bank, yang berakibat berakhirnya perjanjian kredit dan untuk seterusnya dilaksanakan penyerahan dokumen milik debitur (agunan dan surat surat penting lainnya) oleh bank.
- Perhitungan semua kewajiban hutang atau kredit debitur harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan, seperti :
 - Kewajiban bunga
 - Denda/ penalty yang harus dibayar debitur
 - Pokok kredit
 - Dan biaya lainnya
- Selanjutnya debitur mengisi formulir permohonan pelunasan , dan bank harus memastikan akan ketersediaan dana debitur untuk melakukan pelunasan. Setelah dana tersedia barulah transaksi pelunasan dilaksanakan.

- Terakhir penyerahan kembali dokumen agunan dan surat penting lainnya kepada debitur dilaksanakan setelah debitur melunasi semua kewajibannya. Penyerahan dokumen tersebut harus dengan surat tanda terima pengambilan dokumen agunan yang ditanda tangani pejabat berwenang dan debitur.

4.2 Perkembangan Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok

Perkembangan kredit pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok Periode 2007 -2009 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Perkembangan kredit pensiun Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok

Tahun	Total penyaluran kredit pertahun		% pertumbuhan
	Nominal (dalam rupiah)	Jumlah rekening	
2007	24.879.639.000	1725	-
2008	31.406.615.000	1151	26,23 %
2009	39.037.624.000	1747	24.29 %

Sumber : Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan kredit pensiun secara keseluruhan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pembantu Solok selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2007 sampai 2009. Dimulai dari peningkatan penyaluran kredit pensiun pada tahun 2008 yang mengalami peningkatan sebesar 26.23 % dari total penyaluran kredit pensiun pada tahun 2007. Akan tetapi pada tahun 2008

ini BTPN Cabang Pembantu Solok mengalami penurunan jumlah debitur dari tahun 2007, hal ini sedikit mengecewakan karena dengan berkurang jumlah debitur seakan menggambarkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam melakukan pinjaman pada bank BTPN.

Melihat dari perkembangan pada tahun 2008, BTPN Cabang Pembantu Solok terus melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan jumlah nasabah dan jumlah penyaluran kredit yang lebih besar. Dengan usaha dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah akhirnya penyaluran kredit pensiun BTPN Cabang Pembantu Solok pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 24.29 % dari total penyaluran kredit pada tahun 2008. Selain peningkatan dari total nominal penyaluran kredit pensiun, pada tahun 2009 BTPN Cabang Pmbantu Solok juga mampu menyerap jumlah debitur yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan peningkatan ini maka dapat dilihat kepercayaan masyarakat dalam melakukan pinjaman pada BTPN Cabang Pembantu Solok telah meningkat kembali seiring dengan usaha memperbaiki pelayanan yang dilakukan oleh BTPN terhadap para nasabahnya.

4.3 Pengawasan Kredit Pensiun

Pengawasan kredit adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan. Pengawasan kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional sudah dimulai sejak calon debitur mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan

yang dapat merugikan kedua belah pihak. Setelah kredit diberikan pengawasan yang dilakukan oleh bank akan terus berlanjut hingga kredit tersebut telah dikembalikan sepenuhnya oleh debitur. Pengawasan kredit yang dilakukan bank BTPN terdiri dari dua sifat, yaitu :

1. Pengawasan aktif

Adalah pengawasan yang dilakukan dengan on the spot atau pengawasan fisik, yaitu mengunjungi debitur secara langsung sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana keadaan calon debitur.

2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan tertulis yang dilakukan oleh debitur, seperti pengawasan melalui laporan laba rugi yang diberikan oleh debitur.

Pengawasan kredit dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal meliputi seluruh karyawan yang terlibat dalam kelancaran aktivitas Bank, pengawasan terhadap kredit dilakukan oleh unit kerja internal Bank yang dibentuk khusus berfungsi mengawasi seluruh penyaluran kredit Bank BTPN. Sedangkan untuk pengawasan dari pihak eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan Masyarakat.

Dalam proses pengawasan terhadap kredit, yang perlu diperhatikan adalah :

1) Kesempurnaan penguasaan jaminan

Yang dijadikan jaminan dalam penyaluran kredit pensiun ini adalah Surat Keputusan Pensiun (SKEP) asli yang diterbitkan oleh lembaga maupun perusahaan tempat pensiunan bertugas sebelumnya dan menyatakan bahwa pensiunan yang bersangkutan telah berhak untuk menerima manfaat pensiunnya. Surat Keputusan Pensiun ini harus disimpan sebaik mungkin oleh Bank BTPN, karena dengan adanya SKEP asli inilah yang dapat membuktikan bahwa pensiunan telah melakukan pinjaman pada Bank BTPN.

2) Skala angsuran kredit

Skala angsuran kredit merupakan catatan yang memuat klasifikasi kolektibilitas debitur yang dikuantitaskan dalam besaran bulan tunggakan serta mencatat besarnya tunggakan bunga, hutang pokok, dan denda serta mencatat informasi kewajiban debitur di lembaga keuangan lain berdasarkan informasi debitur dari BI. Skala ini juga memuat kolektibilitas sebelumnya dan target pencapaian kolektibilitas berikutnya.

3) Laporan aktivitas usaha

Hal ini dilakukan apabila pinjaman yang dilakukan nasabah digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Tujuan laporan aktivitas usaha ini adalah untuk mengadakan evaluasi atas

kegiatan usaha debitur, bagaimana perkembangan usaha debitur yang dikekolanya, akankah usaha tersebut berjalan dengan baik dan membantu debitur dalam menyelesaikan kreditnya pada bank.

- 4) Deviasi terhadap konsistensi antar periode pelaporan kegiatan usaha yang harus diserahkan.
- 5) Keterkaitan antara fasilitas dengan fasilitas lainnya.

4.4 Pengelolaan kredit bermasalah

Tingkat kredit bermasalah pada kredit pensiun sangat kecil, hal ini tentunya disebabkan karena adanya kerjasama antara antara BTPN dengan lembaga pengelola pensiun dalam hal pemotongan hak pensiun secara langsung untuk pembayaran kredit para pensiunan. Dihitung dari jumlah debitur yang meminjam setiap tahunnya yang termasuk kepada kredit bermasalah hanya 0.5% dari total debitur pada tahun tersebut. Dan untuk penyelesaian kredit bermasalah, hampir semua kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan baik, debitur yang bermasalah akhirnya akan kembali melunasi kreditnya pada bank BTPN. Berikut beberapa hal yang menyebabkan kredit bermasalah pada Bank BTPN :

a) Dari pihak perbankan

Pihak bank kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurang ketelitian petugas dalam mengolah setiap data yang diberikan debitur akan berakibat fatal pada perkembangan kredit seterusnya. Dari pihak bank dapat pula terjadi karena adanya

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan tidak secara subjektif.

b) Dari pihak nasabah, penyebab tunggakan/ kredit bermasalah antara lain:

- Debitur meninggal dunia, klaim asuransi belum cair.

Kredit pensiunan ini diasuransikan selama masa kredit, apabila debitur meninggal dunia maka secara otomatis lembaga pengelola pensiun akan memberhentikan dana pensiun terhadap debitur, dan asuransilah yang akan melunasi sisa kredit debitur. Namun karena keterlambatan keluarga dari debitur yang meninggal melaporkan kepada BTPN bahwa debitur telah meninggal, maka BTPN akan mengalami keterlambatan pula dalam mengurus asuransi debitur, yang akhirnya mengakibatkan kredit macet.

- Debitur tidak melakukan pengambilan uang pensiun secara rutin.

Hal ini terjadi pada kredit pensiun jenis KPP, yaitu bagi pensiunan yang pembayaran gajinya dilakukan melalui instansi lain yang mempunyai kerjasama dengan bank dalam hal pemotongan gaji pensiun untuk pelunasan angsuran. Pada kredit pensiunan jenis KPP apabila pensiunan tidak mengambil gaji pada instansi tersebut maka pemotongan gajipun tidak dapat dilakukan oleh BTPN, sehingga mengakibatkan kredit macet.

- **Mutasi kantor Bayar**

Perpindahan loket atau tempat pembayaran pensiun tanpa pemberitahuan dapat menyebabkan kredit macet bagi bank, karena akan menimbulkan kesulitan bagi bank BTPN untuk pemotongan gaji pensiun.

- **Stop dana pensiun sementara**

Hal ini terjadi karena alasan-alasan tertentu oleh lembaga pengelola pensiun yang menghentikan sementara hak pensiun debitur, misalnya karena ada masalah tertentu antara debitur dengan lembaga pengelola pensiun yang berakibat buruk bagi kelangsungan kredit debitur pada BTPN.

4.5 Kebijakan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Tingkat Kolektibilitas (kelancaran) pinjaman pensiun Bank BTPN yang ditetapkan berdasarkan “kemampuan membayar” terbagi atas 5 klasifikasi yaitu :

1) **Pinjaman Lancar atau kolektibilitas 1**

Yaitu pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pembayaran tepat waktu
- Tidak ada tunggakan
- Semua persyaratan kredit dipenuhi.

2) **Dalam Perhatian Khusus atau Kolektibilitas 2**

Yaitu pinjaman yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

3) Kurang Lancar atau Kolektibilitas 3

Yaitu pinjaman yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 90 hari sampai dengan 120 hari.

4) Diragukan atau Kolektibilitas 4

Yaitu pinjaman yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 120 hari sampai dengan 180 hari.

5) Macet atau Kolektibilitas 5

Yaitu pinjaman yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.

Penyelesaian terhadap kredit bermasalah ini dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya :

- Bagi nasabah yang masuk dalam kolektibilitas 1 atau 2

Bank wajib melakukan *collection* pada nasabah ini, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani keterlambatan pembayaran angsuran. Proses *collection* ini meliputi :

1. Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada debitur karena belum mengambil uang pensiun sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan, karena selama nasabah belum mengambil uang pensiun maka bank BTPN tidak dapat melakukan pemotongan gaji pensiun.
2. Pengiriman Surat Teguran kepada debitur karena belum mengambil uang pensiun sampai dengan tanggal 26 bulan berkenaan.

3. Kunjungan langsung (on the spot) ke alamat debitur oleh petugas bank untuk melakukan penagihan langsung sekaligus untuk memastikan keberadaan debitur. Kunjungan ini wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya terhadap nasabah yang 2 bulan berturut turut tidak mengambil pensiun.

- Bagi nasabah yang masuk pada kolektibilitas 3, 4, dan 5.

Selain melakukan ketiga proses yang dilakukan pada nasabah kolektibilitas 1 dan 2 bank wajib memastikan dilakukan upaya penagihan secara intensif, dan bila memungkinkan dapat dilakukan upaya penyelesaian dalam bentuk *restrukturisasi*.

Yang dimaksud *restrukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap debitur yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya tanpa adanya penambahan plafond kredit.

Restrukturisasi dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perpanjangan Jangka waktu kredit
2. Pemberian Grace periode
3. Penurunan suku bunga

Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dapat diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dalam hal nasabah yang bersangkutan memenuhi kriteria :

1. Berdasarkan pertimbangan bank debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kredit.
2. Masih memiliki sumber pembayaran (uang pensiun/ gaji/ upah)

3. Bersedia memindahkan pembayaran uang pensiun yang sebelumnya dibayarkan melalui kantor bayar lain ke kantor bayar BTPN.
4. Memenuhi ketentuan pemberian kredit yang berlaku.

Setelah pinjaman disetujui untuk dilakukan restrukturisasi maka selanjutnya bank wajib melakukan monitoring terhadap pinjaman tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan agar nasabah mengambil uang pensiun secara teratur setiap bulannya.
2. Memantau ketepatan/ kelancaran pembayaran kredit nasabah yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah, selain melakukan tindakan tindakan yang diupayakan pada nasabah dengan kolektibilitas 1, 2, 3, 4, dan 5, langkah-langkah selanjutnya juga dilakukan oleh bank BTPN jika ternyata kredit belum bisa juga diselamatkan. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah :

a) Hapus buku

Hapus buku adalah pemindahan catatan atas kredit, yang menurut pertimbangan bank sangat kecil kemungkinan untuk dapat ditagih kembali, dari neraca ke rekening administratif tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Hapus buku tidak diperkenankan untuk tujuan rekayasa tingkat kesehatan bank.

Suatu kredit dapat dihapus buku karena berbagai hal sebagai berikut :

1. Kriteria hapus buku otomatis (tidak menunggu sampai kredit termasuk kategori macet lebih dari 180 hari) jika debitur macet disebabkan oleh salah satu alasan berikut :

- a. Debitur meninggal dunia tidak discover asuransi
- b. Penolakan klaim asuransi atau selisih klaim asuransi kredit (SKAK).
- c. Surat Keputusan Pensiun Palsu

2. Kriteria hapus buku normal, yaitu jika debitur telah berada pada kolektibilitas macet (terdapat tunggakan pokok dan bunga selama 180 hari), dan tidak terdapat transaksi selama 6 bulan.

Seluruh kewajiban debitur yang telah dihapus buku wajib dikeluarkan dari neraca dan dipindahkan ke rekening administrative segera setelah usulan hapus buku tersebut disetujui. Untuk memperkecil resiko kerugian, bank tetap melakukan upaya *recovery* (penyembuhan) terhadap debitur hapus buku. Upaya *recovery* (penyembuhan) dapat dilakukan dengan pemberian keringanan pembayaran pokok dan atau bunga bagi debitur Hapus Buku dalam rangka penyelesaian/ pelunasan kewajibannya.

b) Hapus Tagih

Hapus Tagih adalah tindakan Bank untuk menghapuskan seluruh atau sebagian kewajiban debitur, karena berdasarkan pertimbangan

Bank debitur yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya, dan Bank pun juga tidak memiliki hak tagih.

Debitur dianggap tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban bilamana :

1. Debitur telah dihapus buku minimal selama 12 bulan
2. Telah dilakukan upaya upaya penyelesaian secara optimal tanpa adanya perkembangan yang berarti (termasuk telah dilakukan usaha tindakan hukum)
3. Debitur meninggal dunia tidak tercover asuransi (tidak menerima manfaat asuransi jiwa kredit).



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BTPN merupakan Bank Swasta Nasional yang aktivitas utamanya adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiun mulai dari penyaluran dana pensiun hingga pemberian pinjaman kepada para pensiun melalui kredit pensiun. Selain itu Bank BTPN juga melayani nasabah umum lainnya dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro.
2. Perkreditan merupakan salah satu aktivitas penting Bank BTPN KCP. Solok dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kota solok.
3. Kredit pensiunan adalah salah satu produk bank BTPN yang sangat penting, yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan bank BTPN, karena kemudahan Bank dalam menagih pembayaran pinjaman debitur lewat pemotongan uang pensiun secara langsung.
4. Pengawasan kredit pada bank BTPN dimulai semenjak diajukannya permohonan kredit oleh calon debitur, kredit disetujui,

dan diteruskan pengawasan hingga kredit dikembalikan sepenuhnya oleh debitur.

5. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank BTPN bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi kredit yang telah diberikan kepada debitur untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah/ tunggakan kredit.
6. Dalam melakukan pemberian kredit, Bank BTPN mengikat pihak debitur dengan Surat Perjanjian Kredit, dan menjadikan Surat Keterangan Pensiun sebagai jaminan dan bukti bahwa debitur telah melakukan pinjaman pada BTPN. Hal ini dilakukan agar nasabah tersebut melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
7. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bank BTPN KCP.Solok, jumlah kredit pensiunan yang disalurkan dalam tiga tahun terakhir (2007-2009) selalu mengalami peningkatan. Ini merupakan salah satu bukti kepercayaan nasabah kepada Bank BTPN KCP.Solok.
8. Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung uang pensiun baik melalui lembaga pengelola pensiun terkait yakni BTPN, maupun oleh pihak ke 3 yang ditunjuk oleh lembaga pengelola pensiun. Pemotongan langsung ini dapat dilakukan oleh BTPN karena telah melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola pensiun dalam hal pembayaran pensiun/ atau pemotongan hak pensiun.

9. Dalam hal penyerahan dokumen setelah kredit lunas, wajib dilakukan dengan teliti oleh pihak bank. Penyerahan dokumen tersebut harus dengan Surat Tanda Terima pengambilan dokumen agunan yang ditandatangani pejabat berwenang dan debitur atau yang berhak.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yang telah penulis lakukan maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Bank BTPN KCP.Solok dan pihak pihak yang berkepentingan :

1. Penulis menyarankan agar Bank BTPN KCP.Solok melakukan pola pemasaran yang lebih aktif pada nasabah, melakukan pendekatan pendekatan yang baik dan simpati pada setiap calon nasabah yang dianggap potensial.
2. Lebih hati-hati dalam melaukan penyaluran kredit, selektif dalam memilih calon debitur dan menggunakan prinsip kehati hatian dalam menganalisa serta mengambil keputusan untuk penyaluran kredit.
3. Dalam menghadapi tingkat persaingan dunia perbankan yang semakin meningkat, Bank BTPN perlu melakukan pengembangan dalam produknya, yang bertujuan untuk meningkatkan peranan Bank BTPN dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, malayu S.P. 2005. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : FEUGM

Kasmir, SE, MM. 2003. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Laporan Tahunan Perkembangan Kredit Pensiun Bank BTPN KCP. Solok Tahun 2007-2009

Mulyono, Teguh Pudjo, 1994. *Manajemen perkreditan*. Yogyakarta: BPFE

Pedoman dan peraturan Pelaksanaan Kredit Pensiun Bank BTPN KCP. Solok

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar Dasar Perkreditan*. Jakarta. Gramedia

